

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Memasuki akhir dasawarsa kedua abad 21 ini, beruntung bagi setiap individu, kelompok hingga negara secara universal dapat mengenal dan mengakui studi hubungan internasional. Dampaknya tentu saja bagi kemaslahatan umat manusia itu sendiri, salah satu manfaatnya adalah dimana perang yang sejak jaman dahulu telah terjadi bisa diminimalisir dengan pendekatan hubungan internasional. Dari sejarah perkembangan hubungan internasional, secara umum dapat dinyatakan bahwa ilmu hubungan internasional lahir untuk mencegah perang dan membangun perdamaian (Darmayadi, Mulyana, Triwahyuni, Putri, 2015: 12). Sebuah opsi solusi bagi satu bangsa atau sebuah negara agar tidak lagi mengutamakan solusi berperang bila terjadi satu perbedaan atau gesekan dengan pihak yang lain. Darisana kemudian berkembanglah instrument politik luar negeri yaitu diplomasi, dimana masing-masing pihak khususnya negara sebagai state actor bisa berunding dengan pihak lain guna menemukan titik temu dari sebuah permasalahan yang ada. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa konflik dengan menjadikan perang sebagai solusi yang bersifat hard power masih seringkali digunakan namun perbedaannya dengan masa saat istilah hubungan internasional belum dikenal secara umum adalah manusia sebagai korban perang bis-a diminimalisir karena tercipta dan berkembangnya hukum perang dalam hubungan internasional yang harus dihormati.

Dari definisinya menurut George A. Lopez dan Michael S. Stohl, hubungan internasional merupakan suatu aktifitas manusia dimana para individu atau kelompok dari suatu bangsa/negara berinteraksi, resmi atau tidak, dengan para individu atau kelompok dari negara lain (Subarno & Ambarwati, 2016: 7). Selain definisi tersebut, sebenarnya ada banyak definisi lain yang ditafsirkan oleh para ahli, namun walaupun berbeda-beda benang merah dari satu definisi ke definisi lain adalah bahwa hubungan internasional merupakan suatu fenomena sosial berupa pola interaksi yang melibatkan banyak pihak seperti individu, kelompok, hingga negara. hubungan internasional sebagai sebuah studi juga lahir dan berkembang karena setiap actor membutuhkan hal tersebut. Maka kemudian setiap individu termasuk penulis bisa dimudahkan karena bisa memahami hubungan internasional sebagai suatu ilmu studi yang mencakup banyak hal seperti seperti diplomasi, hokum, politik, kerjasama, konflik, perang, kemanusiaan, dll.

Dari aspek historisnya, dahulu hubungan internasional merupakan konsumsi yang segmentatif atau bisa dikatakan tidak semua kalangan bisa menggali segala kaitan tentang hubungan internasional. Sebuah rentang waktu dimana hubungan internasional sebagai konsep masih abu-abu yaitu pada era sebelum perjanjian Westphalia 1648, karena segala aktifitas dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan internasional merupakan konsumsi bagi stakeholder, para pejabat atau bangsawan saja. Hal tersebut tidak lepas akibat faktor dari jaman dimana negara dianggap sebagai actor tunggal dalam hubungan internasional. Barulah kemudian pasca tonggak terjadinya perjanjian Westphalia, hubungan internasional sebagai suatu teori maupun praktik khususnya di eropa dikaji dan dikembangkan

beserta banyak ilmu atau studi lainnya yang sebelum perjanjian terpendam karena kuatnya kuasa gereja pada masa itu.

Diluar studi hubungan internasional yang baru mulai berkembang pesat dan dikenal global 1 abad kebelakang ini, praktik atau aktifitas hubungan internasional telah dilakukan sejak waktu dimana perjanjian Westphalia belum diikrarkan oleh negara-negara di benua Eropa. Pada masa tersebut bentuk hubungan antar satu entitas baik negara atau individu mayoritas berupa perniagaan atau perdagangan, perang, atau misi-misi teologi. Bahkan jauh sebelum tarikh masehi dimulai, hubungan internasional pada peradaban Romawi kuno juga Yunani kuno secara praktik telah diterapkan seperti pengiriman utusan untuk berpidato dan berunding kepada oposisi dengan tujuan bisa menyelesaikan suatu masalah atau juga hak imunitas bagi para para utusan yang datang tersebut. Tidak lupa juga cikal bakal paspor yaitu surat keterangan yang harus dibawa bagi siapa saja yang ingin melintas ataupun bersemayam.

Dari macam-macam aspek tadi barulah kemudian menciptakan satu pakem serta istilah hubungan internasional yang mulai disadari dan dibutuhkan banyak actor internasional khususnya negara sebagai actor yang mempunyai otoritas tertinggi. Kebutuhan akan hubungan internasional itu sendiri didasari karena realitanya, negara sama seperti manusia, adalah satu entitas sosial yang hidup. Negara sekalipun tidak bisa hidup dengan sendiri, butuh kolektifitas dan kalaborasi atau bahkan persaingan untuk bisa mencapai kepentingan nasional yang menghidupi warga negaranya. Maka itulah mengapa hubungan internasional juga disebut fenomena sosial karena apa yang dikaji atau ditelaah oleh hubungan

internasional melibatkan manusia sebagai makhluk sosial, sekaligus negara sebagai ruang yang hidup sehingga menimbulkan gejala sosial atau aktifitas yang bisa dilihat dan dirasakan oleh semua makhluk hidup.

Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita & Yani, 2014: 3-4). Memang ada beberapa kasus dimana sebuah negara tetap stabil dan bisa berjuang demi mempertahankan prinsip akan anti terhadap dunia luar contohnya hingga kini ada Korea Utara, Kuba, ataupun Iran yang bahkan sengaja diisolasi dunia luar. Namun meski begitu jaman sudah berubah, tidak sama lagi seperti pada jaman ketika Jepang menerapkan politik isolasi murni, maka meski sama mengaplikasikan politik isolasi, Korea Utara, Kuba, maupun Iran sama-sama hanya mengisolasi diri terhadap suatu paham atau ideology yang bersebrangan terhadap prinsip dan karakter bangsa bukan kepada hal-hal seperti perdagangan, kerjasama juga hubungan bilateral.

Pesatnya perkembangan hubungan internasional dengan masifnya interaksi atau aktifitas antar actor hubungan internasional dewasa ini kemudian menimbulkan implikasi kentara yang mengakibatkan saling ketergantungan dan keterkaitannya actor-actor hubungan internasional yang selanjutnya disebut interdependensi. Perkembangannya bahkan bisa dikatakan luar biasa dengan manifestasi atau bentuk interaksi yang beragam. Bentuk interaksi yang dimaksud adalah bahwa kini interaksi antar actor hubungan internasional tidak lagi hanya

berupa Government to Government, melainkan juga berupa Government to Citizen, Government to Business, dan Government to Employee. Maka dari itulah kini actor dalam Hubungan Internasional meluas yang meliputi negara hingga individu. Tidak heran pula kemudian, aktifitas hubungan internasional menjadi kebutuhan bagi banyak pihak tersebut.

Lalu akan erat kaitannya ketika membahas interdependensi dengan kepentingan nasional. Keduanya berkaitan karena interdependensi sangat ditentukan oleh kepentingan nasional suatu negara. Sebaliknya ketika sebuah negara salah menafsirkan kepentingan nasionalnya maka justru interdependensi akan berubah menjadi dependensi. Kepentingan nasional disini dalam hubungan internasional adalah landasan bagi suatu negara untuk melakukan suatu hubungan yang dapat menguntungkan dan memenuhi tujuannya. Hubungan disini bisa dalam bentuk hubungan bilateral maupun multilateral. Fenomena ini mudah sekali kita lihat kini dalam pola interaksi negara-negara dunia.

Bahkan pada perkembangannya juga, negara-negara dunia bukan lagi bekerjasama untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dengan 1 atau 2 negara melainkan lebih dari 2 negara sekaligus. Mengingat meluasnya juga kajian hubungan internasional yang kini tidak hanya mengandung isu tradisional, melainkan juga isu modern atau isu non-tradisional. Maka mustahil bagi satu negara dengan populasi manusia yang kian bertambah bisa memenuhi kepentingan nasionalnya sendiri. Solusinya, negara-negara di dunia kemudian berinisiatif untuk secara kolektif menciptakan integrasi dalam satu kelompok menurut kedekatan

geografis maupun kesamaan frekuensi dalam sebuah hal. Dengan begitu orientasi hubungannya adalah pemenuhan kepentingan bersama.

Namun sesuai dengan pemaparan di awal bahwa sebagai pemilik otoritas tertinggi yaitu negara juga memiliki sifat lain selain bersosial, yaitu konflik. Konflik juga bisa dikatakan sebagai bentuk lain dari interaksi antar actor khususnya negara. Sama seperti interdependensi, konflik juga erat kaitannya dengan kepentingan nasional. Perbedaan antara interdependensi dengan konflik adalah bahwa jika interdependensi ditentukan karena orientasi dan frekuensi yang sama, maka konflik sebaliknya, ditentukan karena suatu masalah atau perbedaan orientasi dan frekuensi yang menyebabkan benturan kepentingan.

Fenomena konflik ini diluar dampak negative yang ditimbulkannya justru memantik terjadinya interaksi yang dikenal sebagai tonggak lahirnya kajian hubungan internasional. Tanpa konflik dalam bentuk perang 30 tahun Eropa, mungkin konsesus yang familiar sebagai perjanjian Westphalia 1648 tidak akan pernah terjadi. Maka meski jaman sudah jauh berubah dengan segala macam perubahannya, konflik akan tetap menjadi isu yang tidak akan lepas dari kajian hubungan internasional. Ditunjang oleh faktor bahwa hingga kini meski hubungan internasional dikembangkan untuk tujuan perdamaian, konflik masih terus terjadi dengan masalah yang semakin kompleks. Dampak utama dari konflik sendiri tentu adalah resiko yang paling buruk yaitu perang. Namun berkat hubungan internasional sendiri, resiko puncak tersebut bisa dihindari dengan macam-macam kebijakan yang dikeluarkan seperti pemutusan hubungan diplomatik, embargo, penarikan sementara duta besar, dll.

Konflik yang mewarnai dinamika hubungan internasional bisa kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua kawasan bergejolak karena adanya konflik di masing-masing kawasan. Masih belum selesainya konflik di semenanjung Korea, selalu panasnya hubungan Iran dengan Amerika Serikat, Konflik di Crimea yang melibatkan Ukraina dengan Russia, berangnya Indonesia terhadap penyadapan yang dilakukan Australia, Perang di Somalia, kemunculan ISIS, dan masih banyak lagi contoh yang menjadi bukti valid terhadap eksistensi konflik di hampir setiap kawasan yang ada di dunia. Juga tidak terkecuali di Timur Tengah atau khususnya di teluk Persia yang melibatkan Aliansi Arab Saudi dengan Qatar.

Dalam masalah konflik, salah satu kawasan yang belum pernah surut akan konflik adalah Timur Tengah. Dimulai dari konstruksi sebutan kawasan Timur Dekat hingga Timur Tengah, konflik bahkan perang seakan melekat, pada kawasan ini. Tidak ragu mengapa hal tersebut terjadi karena dari banyak aspek dimulai dari geografis, historis maupun kekayaan yang ada di dalam tanah wilayah ini menjadi pusat perhatian yang memantik banyak pihak untuk dapat menguasainya. Meski disatu sisi kawasan ini sebenarnya layak disebut kawasan suci, mengingat kawasan ini menjadi tempat lahirnya agama-agama Samawi seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Namun justru itu membuktikan juga bahwa faktor tersebut tidak lagi relevan karena faktor dominan dari politik atau benturan kepentingan lah mengapa konflik di Timur Tengah silih datang berganti. Dalam hal ini tentu kepentingan di sini merujuk pada kepentingan nasional yang artinya tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara (Rudy, 2002: 116).

Masih hangat untuk diteliti, fenomena konflik di Timur Tengah sekarang menariknya lebih banyak melibatkan Arab Saudi ke pusaran perselisihan. Belum habis perdebatan Arab Saudi dengan Iran, kini Arab Saudi juga harus berselisih paham dengan Turki terkait kasus pembunuhan Jurnalis Jamal Khashoggi yang berpaspor Arab Saudi, intervensi terhadap politik domestic di Yaman, dan yang teranyar adalah krisis teluk yang dimulai oleh pertikaian Arab Saudi dengan Qatar. Padahal Arab Saudi dikenal luas pandai menempatkan posisi dalam konflik yang ada di dunia tidak terkecuali di Timur Tengah. Pada kasus konflik Israel-Palestina misalnya, meski satu visi dengan banyak negara-negara di dunia dengan mengutuk perlakuan Israel terhadap Palestina, Arab Saudi memilih untuk tidak terlalu berupaya militan seperti negara-negara lain. Itulah sebabnya beberapa waktu di belakang stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan Arab Saudi bisa terjaga akibat kebijakannya Arab Saudi menyikapi kasus di luar wilayahnya.

Barulah kemudian ketika Arab Spring pecah, Arab Saudi seakan ingin menunjukkan power dan hegemoninya terhadap kawasan. Dalam tahap ini, Arab Saudi memilih untuk keras berupaya mendukung para pemimpin negara-negara Arab yang satu frekuensi dengan Arab Saudi. Tentu hal ini dilakukan agar memuluskan Arab Saudi untuk menjadi hegemon di kawasan. Setidaknya ada 2 isu sensitive yang tidak boleh diganggu gugat dan menjadi dasar Arab Saudi begitu agresif yang pertama adalah bagaimana agar negara-negara di Timur Tengah tidak terpengaruh besar oleh paham Iran dan yang kedua adalah mendukung setiap pemimpin ataupun pihak yang jinak terhadap Kerajaan Arab Saudi. Hal ini terpola dalam konflik yang melibatkan Arab Saudi pasca Arab Spring yaitu seperti:



1. Dukungan terhadap pemerintahan Hosni Mubarak. (Menimbulkan eskalasi ketegangan dengan Qatar karena Ikhwanul Muslimin justru mendapat dukungan dari Qatar.)
2. Dukungan terhadap oposisi Suriah. (Akibat dari Assad sebagai pemimpin Suriah beraliran Syiah dan hubungan yang baik dengan Iran.)
3. Perang Saudara di Yaman. (Arab Saudi berkonfrontasi langsung terhadap oposisi pemerintah yaitu Al-Houthi yang didukung oleh Iran.)
4. Konflik dengan Qatar. (Akibat dari Sheikh Khalifa bin Hamad al-Thani yang lepas dari tampuk pemerintahan Qatar dan digantikan oleh keturunannya yang lebih demokratis juga terbuka terhadap musuh-musuh Arab Saudi seperti Iran, Ikhwanul Muslimin, Hamas, dan media yang didukung oleh Qatar sendiri yaitu Al-Jazeera.)

Maka daripada itu tidak menjadi aneh kemudian ketika Arab Saudi dianggap seakan-akan actor yang menyusun scenario akan krisis Teluk sekarang. Realitanya prinsip yang dipegang teguh oleh Keluarga Kerajaan Arab Saudi, 1 dekade terakhir ini diterjemahkan kedalam kebijakan yang agresif guna meredam siapa saja yang bersebrangan dengan Arab Saudi dan yang dianggap ingin menyaingi hegemoni Arab Saudi di kawasan. Ditunjang juga oleh faktor gaya kepemimpinan yang ambisius dari putra mahkota baru Arab Saudi, yaitu Muhammad bin Salman Arab dengan program yang rancangannya Visi Arab 2030. Jadi disengaja ataupun tidak, setiap konflik dan krisis yang melibatkan Arab Saudi kini merupakan dampak dari perubahan sikap Arab Saudi yang bijak ke sikap Arab Saudi yang lebih agresif. Kebetulan 1 dekade terakhir ini dinamika besar terjadi di

Timur Tengah ataupun di Teluk, yang menjadi media bagi Arab Saudi untuk bisa menginstalasi kepentingannya dan keluar dari zona nyaman.

Bahkan bila dikomparasikan dari segi gaya kepemimpinan para petinggi kedua negara baik Arab Saudi maupun Qatar punya gaya yang mirip. Bila Arab Saudi memiliki putra Mahkota yaitu Muhammad bin Salman maka Qatar memiliki sosok Emir muda, Syekh Tamim bin Hamad bin Khalifa al-Tsani. Keduanya mempunyai sifat yang reformis dengan segala kebijakan modernisasi versi masing-masing yang dibawa dan diterapkan oleh keduanya di masing-masing negara juga. Sebenarnya dari perspektif Syekh Tamim bin Hamad bin Khalifa al-Tsani, beliau punya posisi yang lebih nyaman karena tidak harus mereformasi atau membuat sebuah kebijakan yang revolusioner karena sejak rezim Syekh Hamad bin Khalifa al-Tsani, semangat reformasi yang dibawanya telah diterapkan dengan baik. Maka disini Syekh Tamim hanya perlu merawat dan mengembangkakan semangat baru yang dia coba bawa. Terbukti ketika dirinya berkuasa, Syekh Tamim berhasil memenangkan undian dan membawa gelaran turnamen piala dunia ke Qatar pada tahun 2022 nanti. Sedangkan dari sisi Arab Saudi, Muhammad bin Salman dengan pengalaman politik yang dimiliki ketika menduduki menteri pertahanan Arab Saudi tentu mewarnai atau memengaruhi kemana arah politik dan kebijakan luar negeri Arab Saudi. Perang terhadap kelompok Al Houthi merupakan contoh produk kebijakan yang dipengaruhi dan diambil oleh Muhammad bin Salman. Kemudian di tataran domestic, kebijakan non-populis seperti perempuan yang kini diperbolehkan menyetir mobil adalah salah satu contoh memodernisasi Arab Saudi. Juga tidak lupa seperti yang disinggung tadi bahwa modul visi 2030 juga

merupakan sesuatu yang revolusioner yang membawa Arab Saudi agar tidak lagi bergantung secara ekonomi pada sector pertambangan minyak.

Sebenarnya khusus kawasan Teluk secara historis kawasan ini termasuk kawasan yang relatif harmonis. Hal tersebut terjadi karena negara-negara yang ada dalam wilayah Teluk bahkan mempunyai hubungan yang akrab satu sama lain. Walaupun sempat sedikit terusik akibat aneksasi Kuwait oleh Iraq pada tahun 1990. Faktor-faktor seperti kedekatan geografis, iklim politik di kawasan yang stabil dengan tidak ada intervensi satu sama lain, dan stabilitas ekonomi dari masing-masing negara adalah faktor utama mengapa kawasan ini cukup harmonis.

Dilihat dari geografisnya negara teluk merupakan negara-negara Arab penghuni garis pantai teluk Persia. Negara-negara Teluk menurut aspek geografisnya terdiri dari Kuwait, Bahrain, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Minus Iraq, tepat pada tahun 1981 piagam GCC lahir, yang kemudian menghasilkan kesepakatan integrasi dalam bentuk aliansi kerjasama perdagangan resmi yang diberi nama Dewan Kerjasama Teluk atau biasa dikenal dengan GCC. Pada prosesnya hingga kini, intitusi regional tersebut berkembang dengan kerjasama yang berorientasi pada ekonomi melainkan juga pada politik, keamanan, militer, dll. Hal tersebut tercermin dalam pembentukan militer gabungan dalam operasi melawan milisi Al-Houthi di Yaman (Diakses dari <https://internasional.kompas.com/read/2017/06/09/09071971/efek.krisis.diplomati.k.pasukan.qatar.keluar.dari.koalisi.arab.saudi> pada tanggal 07 Juni 2020).

Lantas seperti yang sudah disinggung sebelumnya, meletusnya Arab Spring dan sikap Arab Saudi yang berubah, menyebabkan integrasi negara Teluk menjadi

goyah dan melemah. Hingga pada akhirnya memuncak dan terlihat pada krisis diplomatic Qatar. Arab Saudi dengan beberapa anggota lain negara Teluk melakukan pemutusan hubungan diplomatic terhadap Qatar. Padahal sebelumnya ketika hubungan antar negara Teluk masih stabil, dan tidak saling mengintervensi satu sama lain, proses integrase negara Teluk hamper mencapai integrase yang sempurna. Maksud sempurna disini adalah bahwa negara-negara teluk dapat mengadopsi model integrase yang telah di terapkan negara-negara Eropa yaitu Uni Eropa. Dibuktikan dengan adanya keinginan untuk membentuk sebuah integrase yang tidak kalah kuat dan menyeluruh yaitu Uni Teluk. Hal tersebut diinisiasi langsung pada KTT GCC tahun 2011 oleh mendiang raja Arab Saudi yang terdahulu yaitu Abdullah bin Abdulaziz Al Saud (Diakses dari <https://www.al-monitor.com/pulse/politics/2013/01/saudi-arabia-gcc-announcement.html> pada tanggal 08 Juni 2020).

Namun pada akhirnya wacana integrasi kawasan Teluk terpaksa menguap begitu saja, diperburuk ketika mengkristalnya kekecewaan Arab Saudi pada Qatar pada tahun 2017 lalu. Bentuk dari kekewaan Arab Saudi yang berupa pemutusan diplomatic pada tahun 2017 merupakan dampak terburuk dalam sejarah hubungan antara Qatar dan Arab Saudi. Bahkan sebuah pertanda adanya keretakan dalam hubungan internal antara negara-negara teluk. Krisis diplomatic anantara keduanya bahkan kemudian meluas di tataran kawasan Teluk, dibuktikan ketika 2 negara Teluk yaitu Bahrain dan Uni Emirat Arab juga 1 negara Arab lain yaitu Mesir mengikuti langkah Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar pada waktu yang bersamaan yaitu 5 Juni 2017. Sontak kejadian tersebut

mengejutkan banyak pihak khususnya Qatar sendiri yang secara langsung terkena dampak yang besar atas keputusan keras yang diambil oleh negara-negara Arab Saudi dan koleganya.

Bila kita melihat dari sisi historis hubungan Arab Saudi dengan Qatar, akan menjadi tidak heran ketika fenomena di tahun 2017 mengenai pemutusan hubungan diplomatic Arab Saudi terhadap Qatar terjadi. Pada mulanya hubungan Arab Saudi dengan Qatar cenderung damai. Bahkan Arab Saudi dan Qatar kompak untuk ikut serta dalam kerjasama regional yang dipatenkan namanya menjadi GCC atau dalam bahasa Indonesia disebut dewan kerjasama Teluk. Hal lain mengapa hubungan Arab Saudi dan Qatar sempat harmonis adalah fakta bahwa Arab Saudi merupakan pelindung bagi pemerintahan Qatar atau rezim syekh Hamad secara de Facto. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab mengapa 2 dekade kemudian Arab Saudi menyesali penggulingan pemerintahan Syekh Hamad. Dan benar saja penyebab utamanya dimulainya perseteruan antara Riyadh dengan Doha terjadi ketika Riyadh tidak menyukai rezim Syekh Hamad bin Khalifa al-Tsani digulingkan Syekh Tamim bin Hamad bin Khalifa al-Tsani pada tahun 1995.

Lebih dari sekedar perpindahan tampuk kekuasaan, Qatar oleh Syekh Hamad dibuat menjadi negara yang mandiri dengan tidak lagi bergantung dalam banyak hal pada Arab Saudi. Juga dari sisi negara demokratisasi muncul dan mengingat bahwa demokratisasi tidak mungkin terjadi di negeri-negeri yang berada pada tingkat perkembangan ekonomi yang biasa saja, proses demokratisasi muncul justru di negeri yang kaya (Huntington, 1997: 74). Usaha reformasi kebijakan dan ekonomi yang dilakukan Syekh Hamad adalah seperti kerjasama ladang minyak di

NorthField dengan Iran. Lalu Syekh Hamad menjadi salah seorang initiator terhadap pembentukan media yang didukung secara penuh oleh pemerintah yaitu Al Jazeera yang sekarang menjadi media Timur Tengah terbesar. Relevansinya dengan masa kini adalah beberapa andil besar tersebut juga pada akhirnya kini membuat hubungan Qatar dengan Arab Saudi meretak karena Al Jazeera dan kerjasama Qatar-Iran termasuk kedalam tuntutan Arab Saudi kepada Qatar kini. Belum lagi atas apa yang dibangun oleh Syekh Hamad, Qatar menjadi negara yang diperhitungkan kekuatan, ekonomi, dan pengaruhnya di kawasan. Tentu saja hal tersebut merangsang amarah Arab Saudi karena bertentangan dengan kepentingan nasionalnya untuk menjadi hegemon di kawasan.

Kemudian sempat ada masa dimana konflik antara Arab Saudi dengan Qatar terjadi karena sengketa wilayah. Wilayah yang disengketakan adalah Khawr al-Udayd. Pada akhirnya sengketa wilayah tersebut bisa diakhiri pada tahun 2008 lewat sebuah kesepakatan yang terjadi antar Qatar dan Arab Saudi. Pada titik itu juga persetujuan juga melibatkan Uni Emirat Arab dalam psuaran perebutan wilayah. Disinyalir wilayah tersebut diperebutkan oleh banyak pihak karena kaya akan kandungan sumber daya alam.

Menurut kantor berita resmi pemerintahan Arab Saudi yaitu Saudi Press Agency, faktor paling utama yang menjadi alasan mengapa Arab Saudi memberikan kejutan kepada Qatar di tahun 2017 adalah karena keputusan tersebut diambil untuk melindungi keamanan nasional dari bahaya terorisme dan ekstremisme. Dengan narasi yang demikian maka artinya pemerintah Arab Saudi dan negara pendukung kerajaan menuding bahwa Qatar adalah negara yang

mendukung para ekstremis Timur Tengah dan berkontribusi atas berkembangnya teroris di Timur Tengah. Tuduhan sekaligus label yang diberikan tersebut tentunya segera dibantah oleh Qatar karena menganggap tuduhan tersebut tidak benar dan berdasar. Akan tetapi tetap saja karena pemutusan hubungan diplomatic dilaksanakan seiring adanya maklumat atau sanksi yang mengiringi dan mulai diberlakukan yaitu blockade. bagi diplomat dan setiap warga negara Qatar untuk meninggalkan Arab Saudi.

Lalu sebenarnya, secara kronologis mengenai pemutusan hubungan diplomatic di tahun 2017, pertanda sikap keras dengan pemutusan hubungan diplomatic terhadap Qatar yang ditunjukkan Arab Saudi telah dicirikan pada mulanya oleh Arab Saudi beberapa waktu sebelum pemutusan hubungan diplomatic tersebut dilakukan. Tepat pada tanggal 24 Mei 2017, dalam sebuah acara militer, Emir Qatar pada kesempatannya mengucapkan kata sambutan serta pidato. Dalam beberapa kutipan pidatonya, Syekh Tamim selaku Emir Qatar mengatakan bahwa negaranya memiliki kedekatan hubungan yang baik dengan Iran yang notabene merupakan musuh dari Arab Saudi. Kemudian terlebih pada kesempatan itu juga, Syekh Tamim mengatakan bahwa Iran merupakan salah satu actor politik dan regional yang disegani dan tidak bisa dikesampingkan perannya. Menjadi persoalan kemudian bahwa pidato tersebut dipublikasi oleh media resmi pemerintahan Qatar yaitu Qatar News Agency. Sontak atas dasar hal tersebut pada waktu tidak lama setelah pidato tersebut tersiar, Arab Saudi segera merespon dengan memblokir situs media Qatar di negerinya.

Disaat berita tersebut menjadi kontroversi, pemerintah Qatar segera mengklarifikasi guna meredakan suasana, memberi kepastian dan agar dampak yang ditimbulkan dari pemberitaan tersebut terhadap pihak yang tersinggung tidak membesar. Dalam pembelaannya, Qatar merasa bahwa pemberitaan yang sempat beredar di dunia maya tersebut adalah berita palsu yang dipublikasi oleh peretas. Namun walaupun sudah berupaya keras untuk meluruskan suasana, Arab Saudi sudah tanggung merespon berita tersebut dengan sikap yang tegas. Dari sana kemudian timbulah cikal bakal bahwa dengan persepsi yang saling berseberangan hubungan bilateral Arab Saudi dengan Qatar akan terkena dampak yang serius.

Kemudian merupakan sesuatu yang tidak mengherankan bila kita mengaitkan dengan sebuah kondisi dimana peran media massa dan media sosial khususnya di Timur Tengah, tentulah sangat vital. Arab Spring pada 1 dekade yang lalu bisa meledak dan meluas di Timur Tengah adalah karena media itu sendiri. Keterbukaan informasi, percepatan informasi, dan pemangkasan ruang dan waktu membentuk media dewasa ini menjadi pedang bermata dua. Dimana satu sisi manfaat yang dirasakan bagi khalayak begitu besar, namun disisi yang lain dampak negative yang dihadirkan juga tidak kalah besar. Contohnya tentu saja bisa kita saksikan pada kasus-kasus konflik dan revolusi besar-besaran yang terjadi di Timur Tengah dewasa ini karena bermula dari penggunaan media massa dan isu yang meluas di dunia maya.

Dan bila ditelaah lebih dalam mengapa media massa bisa berperan begitu besar bahkan sudah pada tahap bisa menggerakkan revolusi dan reformasi adalah karena evolusi budaya. Dimana pada akhirnya evolusi tersebut membawa setiap



individu, kelompok atau negara pada posisi yang mudah tersinggung akan pemberitaan yang berkembang di dunia maya. Evolusi budaya disini maksudnya adalah evolusi media yang berakibat pada lahirnya sebuah budaya sekaligus fenomena baru di masyarakat yaitu cancel culture. Dalam hal ini fenomena yang bisa kita saksikan dan kita relevansikan pada cancel culture adalah pada kasus Arab Saudi dengan Qatar yang terjadi di tahun 2017 atau tergolong kasus yang lahir pasca Arab Spring. Cancel culture sendiri berbicara tentang sebuah pola pikir yang berkembang dan kini mungkin sudah menjadi budaya masyarakat internasional ketika berupaya menolak atau memboikot suatu objek atas segala lisan, atau perbuatan yang terekam dalam dunia digital. Jadi analoginya adalah pada kasus Arab Saudi dengan Qatar, karena kesalahan tindakan yang dilekatkan pada negara Qatar itu sendiri yaitu dengan menyinggung kepentingan nasional Arab Saudi di kawasan, maka Arab Saudi disini secara otomatis langsung bersikap tegas dengan kebijakan blockadenya terhadap Qatar sendiri, meski Qatar sendiri telah berupaya keras meyakinkan bahwa kesalahannya merupakan akibat dari kabar palsu yang disebar luaskan oleh peretas yang tidak bertanggung jawab. Harus diingat bahwa tahun-tahun setelah terjadinya Perang Dingin merupakan saksi bagi dimulainya perubahan-perubahan identitas-identitas dan symbol-simbol (Huntington, 1996: 3).

Dari kemelut yang bersumber dari pidato Sheik Tamim itu pada akhirnya membulatkan keputusan Arab Saudi untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar. Disamping itu label lain pun disematkan pada Qatar yaitu negara pendukung ekstremis dan teroris di Timur Tengah. Maka dengan dasar-dasar tadi pada pagi hari di 5 Juni 2017 Arab Saudi resmi memutuskan hubungan

diplomatknya dengan Qatar, yang diikuti oleh pendukung Arab Saudi yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, serta Mesir. Bahkan selang beberapa lama kemudian negara-negara seperti Maladewa dan Libia juga mengikuti jejak aliansi Arab Saudi untuk sama-sama memutuskan hubungan diplomatknya dengan Qatar, walaupun langkah yang diambil tidak setotal dengan Arab Saudi dan aliansinya.

Dalam pemutusan hubungan diplomatic tersebut Arab Saudi juga mengeluarkan kebijakan yang secara tidak langsung meredam pengaruh Qatar di kawasan Teluk juga Timur Tengah secara keseluruhan. Langkah yang diputuskan adalah dengan blockade hubungan secara total dimulai dari blockade darat, laut, dan udara. Belum lagi dengan ultimatum bahwa setiap diplomat Qatar yang diberikan waktu 48 jam untuk meninggalkan kedutaannya di Arab Saudi. Khusus bagi warga negara yang berpaspor Qatar, perintah yang diberikan adalah larangan untuk tinggal atau singgah di Arab Saudi maka dalam arti lain setiap warga negara yang masih berpaspor Qatar meski sudah menetap di Arab Saudi diberikan waktu hingga 14 hari didepan terhitung dari tanggal 5 Juni 2017.

Tentu saja langkah tersebut sangat membebani Qatar. Dimana Arab Saudi yang selama ini meberikan akses dan memfasilitasi banyak kebutuhan warga Qatar karena secara geografis Arab Saudi merupakan negara terdekat yang satu-satunya terhubung dengan daratan Qatar, harus memberlakukan aturan tegas yang telah ditetapkan dalam upaya blockade terhadap Qatar sendiri. Semakin parah juga ketika langkah atau aturan tersebut juga diikuti oleh Bahrain dan Uni Emirat Arab. Salah satu dampak lain akibat pemutusan hubungan diplomatic dan blockade tersebut adalah dimana maskapai penerbangan terbaik yang dimiliki Qatar bahkan dunia

harus rela memilih rute penerbangan baru karena dilarang transit dan melintasi wilayah udara negara yang menerapkan blockade terhadap Qatar.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan konflik kemudian pecah adalah ketidaksukaan Arab Saudi beserta aliansinya terhadap sikap Qatar yang suka mengintervensi pada masalah domestic negara-negara di Timur Tengah. Dimulai dari exposure yang diberikan Al-Jazeera atau media yang didukung penuh pemerintah Qatar pada Osama bin Laden sebagai wajah dari Al-Qaeda ketika Amerika Serikat memulai kampanye war on terrorism. Menggagas menjadi negara mediator antara Taliban dan Amerika Serikat. Menerima tokoh hamas dan melindungi hak suaka dan politiknya. Masuk pada dinamika domestic Bahrain yang berseteru dengan kelompok syiah di negaranya. Berlanjut pada dukungan terhadap Ikhwanul Muslimin pada saat Arab Spring berlangsung. Bahkan ada titik dimana cikal bakal pemutusan hubungan diplomatic yang terjadi di tahun 2017 terjadi sementara karena Qatar dianggap mengingkari kesepakatan GCC. Kemudian faktor lain adalah Qatar terlibat juga pada jatuhnya pemimpin Libya pada masa Arab Spring. Tergabung dalam koalisi kekuatan yang bertugas memukul mundur Al-Houthi. Dan lalu yang paling membuat Arab Saudi menaikkan tensi kemarahannya adalah soal berita tentang kedekatan dan sanjungan untuk Iran yang kabarnya dibicarakan langsung oleh Sheik Hamad selaku Emir Qatar.

Diluar faktor antar kedua negara, ada juga faktor dari komitmen yang diingkari Qatar kepada GCC atau organisasi regional yang berorientasi pada kerjasama ekonomi. Dalam konsensusnya yang dianggap dilanggar oleh Qatar adalah kesepakatan mengenai larangan untuk mendukung pihak yang mengancam

keamanan dan stabilitas kawasan. Maka daripada hal tersebut jika melihat situasinya, Qatar secara kebetulan ataupun tidak, memang selalu berseberangan dengan pilihan dan kepentingan Arab Saudi. Tidak heran sekali lagi baik faktor yang hanya melibatkan antara kedua negara ataupun faktor eksternal seperti GCC yang menaungi Arab Saudi dan Qatar sangat mendukung kedua belah pihak untuk bersitegang.

Dalam perkembangannya kemudian Arab Saudi merangkum secara jelas hal-hal apa saja yang memberatkan hubungan antara Arab Saudi dengan Qatar. Rangkuman yang berisi 13 point itu juga sekaligus merupakan sebuah syarat yang diajukan oleh Arab Saudi terhadap Qatar bila berharap perdamaian dengan Arab Saudi terbuka. Bila tidak tentu saja sulit bagi Arab Saudi untuk melakukan perundingan dengan Qatar guna memperbaiki krisis hubungan yang ada. Berikut merupakan daftar 13 point tuntutan sebagai syarat untuk mengakhiri krisis Arab Saudi dengan Qatar:

1. Qatar harus secara resmi mengumumkan pemutusan hubungan diplomatiknya dengan Iran dan menutup kantor diplomatik Iran di Qatar, mengusir anggota Garda Revolusi Iran dan menghentikan kerjasama militer dan intelijen dengan Iran. Hanya perdagangan yang mematuhi sanksi internasional yang akan diizinkan dengan syarat tidak membahayakan keamanan GCC (Gulf Cooperation Council).
2. Segera menghentikan pembangunan pangkalan militer Turki yang saat ini sedang dibangun dan menghentikan kerja sama militer dengan Turki di dalam wilayah Qatar.

3. Menghentikan semua dukungan dengan semua “organisasi teroris, sektarian dan ideologis,” khususnya Ikhwanul Muslimin, ISIS, al-Qaeda, Jabh Fath Al-Sham (sebelumnya dikenal sebagai Front Al-Nusra) dan Hizbullah Libanon. Qatar harus menyatakan secara resmi bahwa kelompok-kelompok tersebut sebagai kelompok garis keras/teroris berdasarkan daftar kelompok yang diumumkan oleh Arab Saudi, Bahrain, UEA dan Mesir.
4. Menghentikan semua sarana pendanaan dan dukungan untuk tokoh, individu, kelompok atau organisasi yang telah ditunjuk sebagai teroris oleh Arab Saudi, UEA, Mesir, Bahrain, AS dan negara-negara lain.
5. Menyerahkan “tokoh teroris,” dan tokoh-tokoh yang melarikan diri dari Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain ke negara asal mereka. Qatar harus membekukan aset mereka, dan memberikan informasi yang diinginkan tentang tempat tinggal, gerakan dan keuangan mereka.
6. Qatar harus menutup Jaringan TV Al Jazeera dan stasiun afiliasinya.
7. Mengakhiri campur tangan dalam urusan negara tetangga, menghentikan pemberian kewarganegaraan kepada warga negara melarikan diri dari Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain. Qatar harus mencabut kewarganegaraan bagi warga negara melanggar undang-undang negara tersebut.
8. Qatar harus membayar ganti rugi dan kompensasi atas hilangnya nyawa dan kerugian finansial yang disebabkan oleh kebijakan Qatar dalam beberapa tahun terakhir.
9. Qatar harus menyesuaikan diri dengan negara-negara Teluk dan Arab lainnya secara militer, politik, sosial dan ekonomi, serta masalah ekonomi,

sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dengan Arab Saudi pada tahun 2014.

10. Qatar harus menghentikan semua kontak dengan tokoh oposisi politik di Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain.
11. Qatar harus menghentikan semua saluran berita yang menghasut provokasi di kawasan Teluk, baik secara langsung dan tidak langsung, seperti Arabi21, Rassd, Al Araby Al Jadeed, Mekameleen dan Middle East Eye, dll.
12. Qatar harus menyetujui semua tuntutan dalam waktu 10 hari setelah diserahkan ke Qatar, atau blokade akan terus berlanjut.
13. Qatar menyetujui audit bulanan oleh Dewan Kerjasama Teluk (GCC) untuk tahun pertama setelah menyetujui tuntutan tersebut, dan per-kuartal selama tahun kedua. Selama 10 tahun berikutnya, Qatar akan dipantau setiap tahun untuk pelaksanaan komitmen bersama GCC (Diakses dari <https://www.moslemtoday.com/arab-saudi-dan-koalisi-negara-teluk-terbitkan-13-daftar-tuntutan-sebagai-syarat-untuk-mengakhiri-krisis-qatar/> pada tanggal 12 Juni 2020).

Tentu saja sudah bisa ditebak hingga waktu di pertengahan tahun 2020 ini, Qatar masih belum bisa menerima sekaligus menyanggupi tuntutan yang ada. Dampaknya tentu saja hingga kini baik Arab Saudi dan aliansinya belum menemukan titik temu dengan Qatar terkait resolusi konflik dan rekonsialisi hubungan. Bahkan kemudian bagi Qatar 13 tuntutan tersebut adalah bentuk propaganda Arab Saudi terhadap kepentingan nasional Qatar. Bahkan menteri luar negeri Qatar sempat mengatakan kepada awak media bahwa ada kemungkinan

krisis Teluk merupakan konfigurasi yang sengaja dilakukan oleh Arab Saudi untuk membendung Qatar dan membentuk pemikiran bahwa Arab Saudi masih menjadi hegemon kawasan.

Dalam prosesnya penulis tentunya membutuhkan referensi untuk dapat dijadikan standard dan landasan yang nantinya dikaloborasikan dengan pemikiran pribadi. Setidaknya ada 5 referensi skripsi yang relevan dan membantu saya untuk bisa meneliti kajian HI ini. Pertama, ada penelitian skripsi yang bertajuk “*Krisis Hubungan Bilateral Qatar – Arab Saudi Pada 2017*” oleh Nur Muh. Wildan FU dari Universitas Jember. Skripsi ini membahas tentang krisis hubungan bilateral antara Qatar dan Arab Saudi di Timur Tengah. Memburuknya hubungan bilateral Qatar dan Arab Saudi disebabkan oleh sikap Qatar yang ingin menjadi aktor berpengaruh, yang mengancam pengaruh Arab Saudi di kawasan. Beliau menggunakan pendekatan geopolitik dalam menganalisis gejolak peta perpolitikan yang terjadi di Timur Tengah. Dalam penelitian tersebut dijelaskan secara terperinci bagaimana faktor apa saja yang terkait dengan pergeseran peta politik Timur Tengah, dimana beliau menuliskan bahwa pergeseran peta politik Timur Tengah memudar ketika Arab Saudi mendapati negaranya mengalami deficit disatu sisi lain Qatar semakin kuat menancapkan pengaruhnya di kawasan serta harmonisnya hubungan Qatar dengan Iran. Adapun kemiripan atau persamaan dengan penelitian yang saya buat adalah dari sudut pandang kawasan, namun bedanya saya mengecilkan jangkauan kawannya menjadi hanya kawasan Teluk saja.

Kemudian, ada penelitian yang bertajuk “*Propaganda Arab Saudi pada Krisis Diplomati Qatar Tahun 2017*” oleh Faqih Firdaus dari Universitas Jember.

Pada penelitiannya sedari awal beliau menjelaskan atau mengarahkan setiap pembacanya bahwa Arab Saudi melakukan kebijakan blockade adalah karena membendung pengaruh. Maka cara lain yang dipakai selain blockade adalah dengan membuat sebuah propaganda di media massa tandingan dari koalisi Arab Saudi yaitu Al Arabia merupakan salah satu upaya propaganda Arab Saudi terhadap Qatar. Dimana media tersebut sempat mengulas atau menganalisis justifikasi yang dibawa oleh Qatar soal pidato Sheikh Tamim tidak benar adanya karena dikatakan dalam penelitian tersebut juga bahwa alasan yang dipakai tidak masuk akal karena tingkat keamanan akun yang tinggi dan dilihat juga dari aspek bahwa yang menyebarkan berita tersebut adalah media pemerintah Qatar sendiri, jadi tidak masuk akal bahwa tingkat keamanan akun atau website yang dipakai rendah. Adapun persamaan atau kemiripan dengan penelitian saya adalah pada sudut pandang salah satu faktor yang menyebabkan interaksi antar negara mudah terpecah belah karena adanya propaganda media.

Lalu referensi lainnya yang saya dapat adalah penelitian skripsi yang bertajuk "*Analisis Kebijakan Arab Saudi Terkait Blokade Qatar Ditinjau Dari Perspektif Decision Making*" oleh Ahmad Turmudzi, dari Universitas Islam Indonesia. Dalam penelitiannya, beliau menjelaskan penelitiannya dari sudut pandang kebijakan yang diambil oleh Arab Saudi terhadap Qatar. Dari sana beliau mengembangkan sudut pandangnya faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan blockade terhadap Qatar. Maka hasilnya adalah pembagian jawaban kedalam 2 faktor yang mempengaruhi Arab Saudi dalam membuat kebijakan blockade tersebut. Faktor yang terbagi menjadi dua tersebut yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor



internal mempertimbangkan bagaimana keadaan domestik suatu negara mendorong negara tersebut untuk mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan internal negara tersebut. Sedangkan pada faktor eksternal, adalah faktor-faktor yang mempengaruhi Arab Saudi dalam memberlakukan kebijakan blokade tersebut dapat dilihat dari keadaan internasionalnya, dalam hal ini adalah kawasan Timur Tengah itu sendiri. Adapun persamaan atau kemiripan dengan penelitian yang beliau teliti adalah dari pengotak-kotakan faktor apa saja yang mempengaruhi Arab Saudi melakukan blockade.

Selanjutnya ada penelitian skripsi lain juga yang berjudul "*Normalisasi Hubungan Qatar Dan Saudi Arabia 2017-2019*" oleh Hamzah Abdurrahman dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitiannya beliau mengukur seberapa kemungkinan normalisasi hubungan antara Arab Saudi dengan Qatar bisa tercapai. Beliau dalam perhitungannya, memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat normalisasi atau resolusi konflik tercapai dan progress komunikasi terkait konflik tersebut yang telah tercapai hingga waktu beliau menulis penelitian tersebut. Hasilnya beliau mengemukakan bahwa Dengan keinginan Saudi Arabia mengenai kepentingan nasional tersebut, potensi normalisasi akan hubungan antara kedua negara tersebut dapat terjadi. Adapun persamaan atau kemiripan antara penelitian ini dengan saya adalah pada aspek penilaian apakah akan ada kemungkinan bagi kedua negara untuk menemukan resolusi konflik bersama. Hanya saja dalam hal tersebut saya menilainya juga dari aspek apakah ada upaya GCC guna memediasi kedua belah pihak.

Selanjutnya referensi yang saya dapat merupakan penelitian yang berasal dari satu studi dan universitas yang sama. Penelitian tersebut bertajuk "*Hubungan Arab Saudi Dan Qatar Pasca Pemutusan Hubungan Diplomatik Tahun 2017*" oleh Astri Audina Savitri dari Universitas Komputer Indonesia. Dari apa yang diteliti penelitian yang dilakukan beliau lebih mengarah kepada dampak langsung kepada kedua Negara. Dampak seperti dampak ekonomi, lalu dampak politik mendominasi penelitian yang beliau lakukan. Adapun persamaan atau kemiripan yang didapat adalah dari aspek dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut.

Terakhir, referensi lainnya yang membantu saya adalah penelitain skripsi yang bertajuk "*Pemutusan Hubungan Diplomatik Antara Qatar dengan Negara-Negara Jazirah Arab Dalam Perspektif Hukum Internasional*" oleh Afifah Mutiara Liwanri dari Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya pentingnya suatu hubungan diplomatik bagi suatu negara dan bagaimana bila terjadi pemutusan hubungan diplomatik di dalamnya dan bagaimana aturan hukum internasional akan masalah ini. Beliau menitikberatkan penelitian ini pada kaitannya dengan hokum diplomatic yang telah diatur sedemikian rupa oleh hokum internasional. Jadi beberapa landasan dalam hokum diplomatic yang tercantum dalam penelitian beliau relevan dan bisa diaplikasikan dalam penelitian yang akan saya teliti.

Sebagai Novelty, bagi saya dari kelima judul diatas sudah jelas bahwa saya memandang objek yang sama namun dari perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Maksud objek disini adalah kajian tentang fenomena konflik Qatar dengan Arab Saudi. Sedangkan perspektif saya adalah lebih kepada pengaruhnya dan

dampaknya terhadap proses integrasi di kawasan Teluk. Harapannya tentu bisa melengkapi kajian atau penelitian yang ada dengan variasi perspektif dan tujuan penelitian yang sedikit berbeda.

Maka dengan ini atas apa yang sudah dipaparkan diatas, yang menggambarkan kompleksnya konflik antara Arab Saudi dengan Qatar dimulai dari banyak faktor yang melatarbelakangi konflik tersebut seperti aspek sejarah, ekonomi, kepentingan politik, perebutan hegemon, dan kemudian jatuh pada konsekuensi yang harus diambil akibat konflik tersebut yaitu tertundanya pembahasan mengenai integrasi kawasan Teluk yang sempurna maka penulis dengan ini siap mengadakan penelitian dengan judul “Integrasi Kawasan Teluk Pasca Krisis Diplomatik Arab Saudi Dengan Qatar Tahun 2017-2020”.

Untuk cakupan materinya peneliti berpedoman pada “Core Subject” yaitu meliputi Sejarah Diplomasi dan Hubungan Internasional, Konflik, Kepentingan Nasional, dan Integrasi Kawasan. Maka ketertarikan peneliti untuk meneliti dan mengangkat isu tersebut didukung oleh core subject yang terdapat dalam beberapa mata kuliah disiplin Ilmu Hubungan Internasional, diantaranya adalah mata kuliah, Hukum Internasional, Regionalisme, Studi Timur Tengah.

1. Mata kuliah Hukum Internasional, dimana hubungan diplomatik dan konsuler menjadi salah satu kajian didalam mata kuliah hukum internasional tersebut.
2. Mata kuliah Regionalisme dimana dalam kajian yang luas, Regionalisme mengenalkan saya sebuah konsep integrasi sempurna yang termasuk ke dalam konsep integrasi ekonomi kawasan dari Bela Balassa.

3. Mata kuliah Studi Timur Tengah yang membahas mengenai pemetaan konflik antar negara di Timur Tengah dan sejarah Timur Tengah itu sendiri.

Didasarkan pada hal – hal tersebut diatas, maka penelitian ini dilakukan sebagai landasan skripsi berdasarkan relevansi “core subject” di prodi Ilmu Hubungan Internasional UNIKOM. Dalam penelitian ini peneliti menitik beratkan pada pokok bahasan konflik dan integrasi kawasan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka saya membagi rumusan masalah kedalam 2 kategori:

### **1.2.1 Rumusan Masalah Mayor**

Bagaimana integrasi kawasan Teluk pasca krisis diplomatik Arab Saudi dengan Qatar?

### **1.2.2 Rumusan Masalah Minor**

1. Sejauh mana proses integrasi kawasan Teluk sebelum pemutusan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dengan Qatar pada tahun 2017 meletus?
2. Kepentingan apa dibalik 13 tuntutan yang diajukan oleh Arab Saudi kepada Qatar?
3. Sejauh mana prospek integrasi kawasan Teluk pasca krisis diplomatik Arab Saudi dengan Qatar di tahun 2017?

### **1.2.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah diajukan oleh peneliti agar mempersempit fokus terhadap masalah. Pada penelitian ini penulis berfokus pada krisis diplomatic yang terjadi antara Arab Saudi dengan Qatar pada tahun 2017-2020. Dalam masalah tersebut, peneliti juga mengkorelasikan masalah tersebut dengan masalah integrasi kawasan Teluk yang hingga waktu penelitian ini dibuat, belum bisa tercapai. Peneliti sengaja memilih periode waktu 2017-2020 karena pada periode waktu tersebut merupakan titik terburuk diantara dinamika yang telah terjadi antara Arab Saudi dengan Qatar khususnya dalam hal, hubungan diplomatic yang sudah terjalin oleh Arab Saudi dengan Qatar begitu juga aliansi Arab Saudi dengan Qatar.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Berdasarkan premis yang telah diuraikan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana integrasi kawasan Teluk pasca krisis diplomatik Arab Saudi dengan Qatar.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Mengetahui perkembangan integrasi negara Teluk sebelum dan pasca krisis diplomatic pada tahun 2017.
2. Mengetahui kepentingan dibalik 13 tuntutan yang diajukan oleh Arab Saudi terhadap Qatar.
3. Mengetahui alasan Qatar yang hingga kini belum mengisyaratkan akan menuruti 13 tuntutan dari Arab Saudi dan aliansinya.

4. Mengetahui besarnya pengaruh Arab Saudi terhadap kawasan Teluk.
5. Mengetahui peran organisasi regional Teluk terhadap isu politik dan konflik antara sesama negara kawasan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penulisan makalah ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi baru yang dapat membawa setiap pembacanya menyelami kajian hubungan internasional. Bahwa hubungan internasional adalah sebuah ilmu yang kaya karena cakupan kajiannya yang luas. Parameter bahwa ilmu hubungan internasional luas tercermin dari initsari penelitian ini yaitu konflik antara Arab Saudi dengan Qatar, apa yang dibahas dalam penelitian ini justru lebih dari sekedar konflik dari pihak-pihak yang terkait saja, tetapi melibatkan juga pemahaman dan pembahasan mengenai interdependensi, kawasan, ekonomi-politik, organisasi regional, dll.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat praktis seperti:

1. Mengidentifikasi proses dan kebijakan politik yang diambil oleh negara ketika kepentingannya bersebrangan dengan negara lain.
2. Dapat menganalisa pengaruh konflik antar negara kawasan terhadap kawasan itu sendiri melalui perspektif regionalism.